

**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, Dinas PMD Kabupaten Sampang menyusun Renja Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelumnya dalam Renstra Perangkat Daerah;
- b. Renja Perangkat Daerah disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun berkenaan;
- c. Renja merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan;
- d. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu:

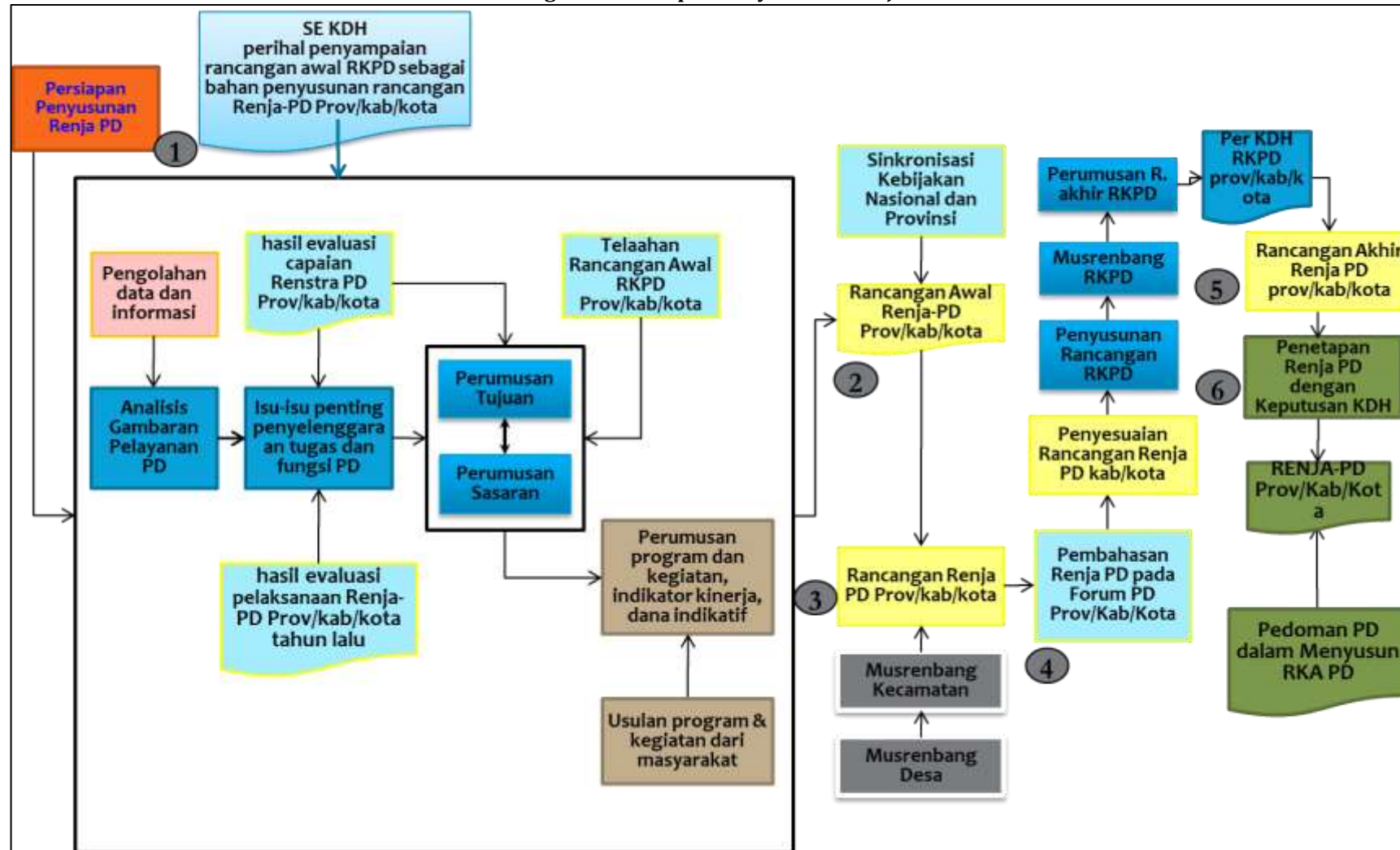
- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Setelah melalui beberapa tahapan dalam penyusunannya, Rancangan Renja perangkat daerah disempurnakan dan menjadi Renja Perangkat Daerah yang definitif dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen penjabaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022;
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
3. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju Tahun 2023.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan dan kedudukan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Renja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sampang disusun Sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan kontribusi sektor unggulan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas PMD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa serta Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa”**.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas PMD Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2015-2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2022 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2022 secara umum adalah:

1. Tersedianya dokumen penjabaran Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung beserta Program dan Kegiatannya.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2021 dan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2019-2024

Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas PMD.

Evaluasi Renstra Dinas PMD sampai dengan Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran RPJMD 2019-2024 yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terealisasi sampai dengan tahun anggaran berjalan.

Dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024 memuat 7 program dan 20 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Program dan kegiatan tersebut dapat diukur penyerapan anggarannya. Adapun rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas PMD sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas PMD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d. Tahun 2021

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|--------------------|---|--|---|-----------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi a/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | | | | | | |
| | 1.22.01.5.1.1. | Belanja Pegawai | Persentase Pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan selama 1 tahun | 2.953.218.255 | 2.712.322.233 | 3.228.849.000 | 2.621.663.427 | 81,19% | 3.525.669.106 | 8.859.654.766 | 300 |
| | | BELANJA LANGSUNG | | | | | | | | | |
| | 1.22.1.22.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor | 3.304.221.750 | 350.646.631 | 386.171.188 | 370.122.956 | 95,84 | 119.340.835 | 840.110.422 | 25,42 |
| 1 | 1.22.1.22.01.01.01 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah surat keluar Bapemas Kab. Sampang yang terkirim selama 1 tahun | 1.708.094.750 | 131.088.049 | 243.914.783 | 234.418.626 | 96,11% | 3.610.000 | 369.116.675 | 21,60 |
| 2 | 1.22.1.22.01.01.02 | Penyediaan sarana Administrasi Perkantoran | Penyediaan jasa sambungan telepon, air dan listrik pada kantor Bapemas Kab.Sampang selama 1 tahun | 200.715.652 | 69.952.432 | 33.961.405 | 33.926.228 | 99,90% | 57.253.835 | 161.132.495 | 80,27 |
| 3 | 1.22.1.22.01.01.06 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | Jumlah Kegiatan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti oleh karyawan DPMD Kab.Sampang | 1.596.127.000 | 149.606.150 | 108.295.000 | 101.778.102 | 93,98% | 58.477.000 | 309.861.252 | 19,41 |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi a/d. Tahun 2020 (tahun n-1) | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra (%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | 1.22.1.22.01.02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarpras aparatur yang layak pakai | 3.891.194.655 | 288.284.850 | 313.703.250 | 312.540.775 | 99,63 | 341.200.000 | 942.025.625 | 24,20 |
| 4 | | Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor | Jumlah Pembangunan/rehab/pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan DPMD kab.Sampang | 1.558.040.000 | 49.538.200 | 0 | 0 | 99,18% | 30.000.000 | 79.538.200 | 5,10 |
| 5 | | Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional DPMD Kab.Sampang yang dibeli dan terpelihara | 1.114.070.000 | 148.235.750 | 213.818.000 | 213.748.675 | 97,97% | 153.100.000 | 515.084.425 | 46,23 |
| 6 | 1.22.1.22.01.02.12 | Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kantor | Jumlah peralatan kantor yang dibeli DPMD Kab.Sampang | 1.219.084.655 | 90.510.900 | 99.885.250 | 98.792.100 | 98,91% | 158.100.000 | 347.403.000 | 28,49 |
| | 1.22.1.22.01.05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Sumber Daya Aparatur yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sesuai tupoksi | 695.758.441 | 16.324.350 | 21.089.000 | 21.089.000 | 100% | 0 | 37.413.350 | 5,30 |
| 7 | 1.22.1.22.01.05.01 | Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar | Jumlah Karyawan DPMD Kab.Sampang yang mengikuti Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal | 695.758.441 | 16.324.350 | 21.089.000 | 21.089.000 | 100% | 0 | 37.413.350 | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|--------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi a/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 1.22.1.22.01.06 | Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik | Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang baik dan benar | 309.287.250 | 44.072.500 | 11.143.000 | 1.074.160 | 99,38% | 52.791.910 | 97.938.570 | 31,66 |
| 8 | 1.22.1.22.01.06.01 | Penyusunan laporan kinerja dan keuangan | Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD yang dibuat oleh Bapemas Kab.Sampang | 103.287.250 | 14.415.000 | 5.125.000 | 5.077.850 | 99,08 | 13.845.500 | 33.338.350 | 32,27 |
| 9 | 1.22.1.22.01.06.02 | Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh DPMD Kab.Sampang | 101.750.000 | 15.000.000 | 6.018.000 | 5.996.310 | 99,64 | 38.946.410 | 59.942.720 | 58,91 |
| 10 | 1.22.1.22.01.06.03 | Peningkatan Pelayanan informasi publik | Jumlah pameran pembangunan/pawai pembangunan yang diikuti oleh DPMD Kab. Sampang | 104.250.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 14,38 |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|--------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi a/d. Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | | Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan | Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif | 2.113.341.096 | 2.107.828.281 | 1.500.944.275 | 1.478.001.036 | 98,47 | 1.222.960.579 | 4.808.789.896 | 227,54% |
| 11 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah kegiatan pemantapan kelembagaan TP-PKK Desa/Kelurahan | 766.695.000 | 816.292.904 | 725.919.700 | 704.335.311 | 97,03 | 576.609.780 | 2.097.237.995 | 75,20% |
| 12 | 1.22.1.22.01.15.02 | Pemberdayaan Lembaga Tradisi Masyarakat | Jumlah RKK yang diberi pendidikan dan pelatihan dan bantuan alat kematian | 590.376.500 | 551.171.007 | 544.983.525 | 544.086.775 | 99,84 | 369.375.356 | 1.464.633.138 | 248,08% |
| 13 | 1.22.1.22.01.15.07 | Pembinaan Kelompok Pendampingan Masyarakat | Terciptanya Pengembangan Potensi Unggulan Desa | 756.269.596 | 740.364.370 | 230.041.500 | 229.578.950 | 99,80 | 276.975.443 | 1.246.918.763 | 164,87% |
| | | Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna | Persentase lembaga ekonomi yang berkembang | 4.090.356.892 | 3.260.389.625 | 345.118.015 | 313.146.390 | 90,74 | 847.242.491 | 4.420.778.506 | 108,07 |
| 14 | 1.22.1.22.01.19.04 | Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Desa | Meningkatkan iklim yang kondusif bagi usaha pedesaan | 557.200.000 | 235.541.882 | 209.890.610 | 183.442.045 | 87,40 | 337.271.832 | 756.255.759 | 135,72 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|------------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| 15 | 1.22.1.22.01.16.02 | Pengembangan Sarana Prasarana Desa | Jumlah desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan simpan pinjam untuk meningkatkan perekonomian | 3.433.156.892 | 2.928.331.043 | 83.549.750 | 78.615.545 | 94,09 | 435.629.095 | 3.442.575.683 | 100,27 |
| 16 | 1.22.1.22.01.16.05 | Tehnologi Tepat Guna | Jumlah TTG yang dikirim dalam gelar TTG nasional dari Kab.Sampang | 100.000.000 | 96.516.700 | 51,667,655 | 51,088,800 | 98,86 | 74.341.564 | 221.947.064 | 221,94 |
| | 1.22.1.22.01.18 | Program Bina Pemerintahan Desa | Persentase perencanaan, penganggaran dan tata kelola aset yang baik | 3.564.836.967 | 1.850.295.749 | 1.672.235.729 | 1.410.247.066 | 84,33 | 3.481.825.117 | 6.742.367.932 | 189,13 |
| 17 | 1.22.1.22.01.16.10 | Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa | Jumlah aparatur yang mendapatkan pemantapan untuk meningkatkan kapasitasnya | 1.007.582.751 | 232.499.600 | 347.522.370 | 347.393.300 | 99,96 | 2.521.334.204 | 3.101.227.104 | 307,78 |
| 18 | 1.22.1.22.01.15.06 | Peningkatan Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan bimbingan dan fasilitasi APBDes 14 Kecamatan dan 180 Desa | 1.235.841.091 | 661.206.738 | 424.600.000 | 420.996.641 | 99,15 | 140.938.979 | 1.223.142.358 | 98,97 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian |
| | | | | | | | | | | | (tahun n-1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| 49 | 1.22.1.22.01.18.02 | Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan aset Desa | Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk pengembangan aset desa dan sosialisasi aplikasi aset desa yang dilaksanakan | 860.349.125 | 578.978.736 | 235.578.504 | 234.178.077 | 99,41 | 150.523.151 | 963.679.964 | 112,01 |
| 50 | 1.22.1.22.01.18.03 | Monitoring Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Jumlah pilkades yang dilakukan evaluasi dan monitoring | 461.064.000 | 377.610.675 | 664.534.855 | 407.679.048 | 61,35 | 335.247.816 | 1.120.537.539 | 243,03 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2.13.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | 4.775.186.007 | 2.006.373.493 | 42% |
| | 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu | | | | | | 77.896.460 | 12.518.640 | |
| | 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun | | | | | | 6.651.485 | 5.795.000 | 87% |
| | 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun | | | | | | 6.458.985 | 0 | 0 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2021 | |
|----|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun | | | | | | 6.458.985 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun | | | | | | 6.458.985 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun | | | | | | 6.458.985 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun | | | | | | 6.458.985 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu | 100 | | | | | 3.548.977.919 | | |
| | 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pegawai selama 1 tahun | | | | | | 3.525.669.106 | 1.662.765.597 | 47% |
| | 2.13.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ATK yang disediakan | | | | | | 9.463.313 | 9.074.450 | 96% |
| | 2.13.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun | | | | | | 6.922.475 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun | | | | | | 6.923.025 | 1.950.000 | 28% |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|---------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| | 2.13.01.2.05.09 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bimtek perundangan-undangan DBHCT yang disosialisasikan | | | | | | 523.084.742 | 0 | 0 |
| | 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | | | | | 93.563.796 | 63.422.800 | |
| | 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Listrik yang disediakan | | | | | | 6.209.861 | 6.172.000 | 99% |
| | 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | | | | 14.604.038 | 8.120.300 | 56% |
| | 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan | | | | | | 5.432.897 | 5.397.900 | 99% |
| | 2.13.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan yang disediakan | | | | | | 5.280.000 | 2.640.000 | 44% |
| | 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | 3.560.000 | 3.557.600 | 100% |
| | 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar dan dalam Daerah | | | | | | 58.477.000 | 44.045.000 | 75% |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|---------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | | | | | 168.549.305 | 100.950.000 | 60% |
| | 2.13.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan sesuai tugas dan fungsi | | | | | | 168.549.305 | 100.950.000 | 60% |
| | 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran | | | | | | 213.863.835 | 79.892.960 | |
| | 2.13.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim | | | | | | 3.610.000 | 3.595.000 | 100% |
| | 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet | | | | | | 57.253.835 | 20.613.531 | 36% |
| | 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | | | | | | 153.000.000 | 73.500.000 | 48% |
| | 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik | | | | | | 209.499.180 | 44.760.775 | |
| | 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan | | | | | | 153.100.000 | 46.373.475 | 30% |
| | 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara | | | | | | 5.100.000 | 5.100.000 | 100 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara | | | | | | 30.000.000 | 0 | 0 |
| | 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | Persentase desa dengan penataan sarana prasarana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik | | | | | | 423.693.621 | 308.609.952 | 71% |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Persentase desa dengan perawatan sarana dan prasana yang dikelola BUMDes/BUMDesma yang baik | | | | | | 423.693.621 | 308.609.952 | 71% |
| | 2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | Jumlah pembinaan pengelolaan desa wisata yang dilaksanakan | | | | | | 423.693.621 | 308.609.952 | 71% |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|---------------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dengan tata administrasi desa yang baik | | | | | | 3.481.825.117 | 1.420.580.126 | 41% |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan tata administrasi desa yang baik dan tepat waktu | | | | | | 9.099.538.370 | 1.420.580.126 | 41% |
| | 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek administrasi pemerintahan desa | | | | | | 275.763.532 | 152.890.800 | 55% |
| | 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan sosialisasi mengenai produk hukum pemerintahan desa dan jumlah aparatur yang dilatih | | | | | | 58.017.436 | 0 | 0 |
| | 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan bimtek penyusunan perencanaan pembangunan desa | | | | | | 87.821.406 | 0 | 0 |
| | 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah operator yang mendapatkan pelatihan penginputan data SISKUEDES dan OMSPAN | | | | | | 53.117.573 | 0 | 0 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi, dan jumlah desa yang perangkat desanya mendapatkan jaminan kesehatan BPJS | | | | | | 2.521.334.204 | 1.223.740.656 | 49% |
| | 2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Jmah operator yg dibimtek evaluasi pengelolaan keuangan desa | | | | | | 105.717.398 | 0 | 0 |
| | 2.13.04.2.01.09 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades serentak | | | | | | 306.753.592 | 43.948.670 | 14% |
| | 2.13.04.2.01.10 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah desa yang anggota BPDnya berakhir dan jumlah pembaharuan perangkat desa | | | | | | 28.494.223 | 0 | 0 |
| | 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan aset | Jumlah aparatur desa yang dibina tata aset desa | | | | | | 20.936.430 | 0 | 0 |
| | 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa/kel | Jumlah desa yang mengikuti lomba desa terbaik | | | | | | 23.869.323 | 0 | 0 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|-----------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LK) dan ekonomi Desa yang aktif | | | | | 1.634.573.975 | 324.458.687 | 20% | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | 'Persentase lembaga kemasyarakatan (LK) dan lembaga pengembangan ekonomi desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan peningkatan kelembagaan | | | | | 1.634.573.975 | 324.458.687 | 20% | |
| | 2.13.05.2.01.03 | Fasilitasi Penataan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | 138.892.850 | 1.681.550 | 1% | |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Prog./Keg. Renstra 2019-2024 | Realisasi Kinerja s/d. Tahun 2019 | Target Kinerja Program dan Kegiatan Renja Tahun 2020 | | | Target Kinerja Tahun 2021 | Prakiraan Realisasi Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019-2024 s/d. Tahun 2020 | |
|----|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi s/d. Tahun 2021 | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Renstra |
| | | | | | | | | | | (tahun n-1) | (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) | |
| | 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) dan LPMD/K (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan) yang dilatih | | | | | 276.975.443 | 159.358.940 | 58% | |
| | 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah BUMDesa yang dibentuk (180 BUMDesa), jumlah pengurus BUMDes yang dilatih, dan monitoring dan pembinaan yang dilakukan | | | | | 337.271.832 | 24.446.360 | 8% | |
| | 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah pameran dan lomba TTG nasional yang diikuti dan jumlah workshop TTG yang dilaksanakan | | | | | 74.341.564 | 62.384.000 | 84% | |
| | 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah kegiatan lomba gotong royong yang dilaksanakan dan jumlah kelompok gotong royong yang mendapatkan pembinaan | | | | | 230.482.506 | 44.288.637 | 9% | |
| | 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah 10 Program pokok PKK yang dilaksanakan, Jumlah jambore dan Pelatihan kader PKK yang dilaksanakan | | | | | 576.609.780 | 32.299.200 | 6% | |

Evaluasi terhadap rekapitulasi pelaksanaan Renstra Dinas PMD sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Semua program dan kegiatan di Renstra pada Tahun 2019-2024 telah dijabarkan sepenuhnya dalam Renja Perangkat Daerah tahun tersebut.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan pergeseran karena perubahan nomenklatur program dan kegiatan menyesuaikan dengan Permendagri No. 50 tahun 2020
3. Serapan kegiatan pada tahun 2020 mencapai Rp. 6.537.884.810 atau 87,41 persen dari total anggaran sebesar Rp. 7.479.253.457 dengan rincian sebagai berikut; Belanja langsung sebesar Rp. 4.250.404.457 terealisasi sebesar Rp. 3.916.221.383 atau 92,14 persen. Sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.228.849.000 terealisasi sebesar Rp. 2.621.663.427 atau 81,19 persen.
4. Sedangkan untuk serapan program dan kegiatan pada tahun 2021 hingga 30 Juli 2021, dari total anggaran Rp. 10.327.214.194 baru terserap Rp. 4.060.022.258 atau sekitar 39%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra Perubahan 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Sampang

| No | Indikator | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Capaian Analisis |
|-----|--|--------------------------|-----|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | Tahun (thn n-2) | Tahun (thn n-1) | Tahun (thn n) | Tahun (thn n+1) | Tahun (thn n-2) | Tahun (thn n-1) | Tahun (thn n) | Tahun (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju/Mandiri | n/a | n/a | 44,44 | 51,67 | 100 | 100 | 44,44 | 90,55 | 100 | 100 | |
| 2 | Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan aset yang benar dan tepat waktu | n/a | n/a | 55,55 | 66,67 | 77,77 | 81,11 | 55,55 | 66,67 | 77,77 | 81,11 | |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Dinas PMD sebagai dinas yang memiliki tugas pokok di membantu bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur **Peraturan Bupati No. 77 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Dinas PMD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
2. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Dinas PMD;
3. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Dinas PMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- 1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD secara ideal;
- 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- 3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- 4 Perkembangan teknologi dan informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 dilakukan melalui proses membandingkan antara usulan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 dengan kebutuhan riil Dinas PMD Kabupaten Sampang pada tahun tersebut.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir usulan-usulan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah yang dikompilasikan dengan kebutuhan riil dengan tujuan menetapkan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan Tupoksi Dinas PMD Kabupaten Sampang. Review tersebut di gambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Sampang

| Kode | RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN DINAS PMD TAHUN 2022 | | | | |
|-----------------|--|------------------|--|----------------|----------------------|--|------------------|--|----------------|----------------------|
| | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 43.590.941.653 | | | | | 43.590.941.653 | |
| 2.13.01. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas PMD | Persentase Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan | 100% | 4.216.118.446 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas PMD | Persentase Urusan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan | 100% | 4.216.118.446 |
| 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat | 100% | 14.391.490 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat | 100% | 14.391.490 |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat | 29 dokumen | 2.398.490 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat | 29 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.765 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.765 |
| 2.13.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan | 100% | 3.532.318.998 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase administrasi keuangan yang dilaksanakan | 100% | 3.532.318.998 |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan | 12 bln | 3.525.669.106 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan | 12 bln | 3.525.669.106 |
| 2.13.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah pemenuhan alat tulis kantor | 12 bln | 6.649.892 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | Jumlah pemenuhan alat tulis kantor | 12 bln | 6.649.892 |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase administrasi umum yang dilaksanakan | 100% | 57.452.287 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase administrasi umum yang dilaksanakan | 100% | 57.452.287 |
| 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jumlah komponen listrik yang tersedia | | 3.678.185 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | Jumlah komponen listrik yang tersedia | | 3.678.185 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|---|--|--|----------------------------|--------------------|
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 15 unit | 8.726.727 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 15 unit | 8.726.727 |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | | Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia | 10 dokumen | 5.630.000 | Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan | | Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia | 10 dokumen | 5.630.000 |
| 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah kunjungan tamu selama 1 tahun | 400 | 3.120.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah kunjungan tamu selama 1 tahun | 400 | 3.120.000 |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan | 100 paket | 36.297.375 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan | 100 paket | 36.297.375 |
| 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase barang milik daerah yang tersedia | 100% | 249.922.618 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase barang milik daerah yang tersedia | 100% | 249.922.618 |
| 2.13.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia | 25 unit | 249.922.618 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia | 25 unit | 249.922.618 |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 194.533.328 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase jasa penunjang urusan PD yang dilaksanakan | 100% | 194.533.328 |
| 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | | Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar | 12 bulan | 57.533.328 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | | Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar | 12 bulan | 57.533.328 |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | | Jumlah pelayanan umum yang tersedia | 100 | 137.000.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor | | Jumlah pelayanan umum yang tersedia | 100 | 137.000.000 |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik negara daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang milik negara yang terpelihara dengan baik | 100% | 167.500.000 | Pemeliharaan Barang Milik negara daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Barang milik negara yang terpelihara dengan baik | 100% | 167.500.000 |
| 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah jasa service kendaraan operasional dan perepanjangan STNK roda 2 dan roda 4 | 12 unit / 2 unit | 163.100.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah jasa service kendaraan operasional dan perepanjangan STNK roda 2 dan roda 4 | 12 unit / 2 unit | 163.100.000 |
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | 30 kali | 4.400.00 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | | Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | 30 kali | 4.400.00 |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | 36.299.999.686 | | | | | 36.299.999.686 |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | 36.299.999.686 | | | | | 36.299.999.686 |
| 2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa | | Persentase aset desa yang dikelola BUMDES | 57,78% | 36.299.999.686 | Persentase aset desa yang dikelola BUMDES | | Persentase aset desa yang dikelola BUMDES | 57,78% | 36.299.999.686 |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | a) Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik b) Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik | 100 77,78 | 800.080.909 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | c) Persentase desa dengan perencanaan dan penganggaran yang baik d) Persentase desa dengan tata kelola aset yang baik | 100 77,78 | 800.080.909 |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | Persentase penyelenggaraan pengawasan administrasi dokumen administrasi desa yang baik | 100% | 800.080.909 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | Persentase penyelenggaraan administrasi dokumen administrasi desa yang baik | 100% | 800.080.909 |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | | Jumlah administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi | 112 desa | 61.611.188 | Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | | Jumlah administrasi pemerintahan desa yang difasilitasi | 112 desa | 61.611.188 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan produk hukum desa | | Jumlah desa yang mendaparkan sosialisasi produk hukum desa | 180 desa | 62.863.674 | Fasilitasi Penyusunan produk hukum desa | | Jumlah desa yang mendaparkan sosialisasi produk hukum desa | 180 desa | 62.863.674 |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa | | Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi | 180 desa | 69.662.477 | Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan desa | | Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi | 180 desa | 69.662.477 |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN | 180 desa | 65.931.983 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN | 180 desa | 65.931.983 |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa | | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi Jumlah aparatur desa yang mendapatkan BPJS kesehatan Jumlah rakor bagi aparatur desa yang dilaksanakan | 360 orang 180 orang 14 kali | 117.881.213 | Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur desa | | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi Jumlah aparatur desa yang mendapatkan BPJS kesehatan Jumlah rakor bagi aparatur desa yang dilaksanakan | 360 orang 180 orang 14 kali | 117.881.213 |
| 2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | | Jumlah monitoring dan evaluasi perdes yang dilaksanakan | 180 | 101.685.310 | Evaluasi dan pengawasan peraturan desa | | Jumlah monitoring dan evaluasi perdes yang dilaksanakan | 180 | 101.685.310 |
| 2.13.04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | | Jumlah fasilitasi pengisian anggota BPD yang berakhir Jumlah pembaharuan data perangkat desa | 125 desa 180 desa | 108.090.193 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa | | Jumlah fasilitasi pengisian anggota BPD yang berakhir Jumlah pembaharuan data perangkat desa | 125 desa 180 desa | 108.090.193 |
| 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan Aset desa | | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tata kelola aset desa | 38 desa | 149.999.870 | Fasilitasi Pengelolaan Aset desa | | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tata kelola aset desa | 38 desa | 149.999.870 |
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi evaluasi perkembangan dsesa serta lomba desa dan kelurahan | | Jumlah evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan Jumlah pemenang lomba desa/kelurahan terpilih | 180 desa 1 desa | 62.355.001 | Fasilitasi evaluasi perkembangan dsesa serta lomba desa dan kelurahan | | Jumlah evaluasi perkembangan desa yang dilaksanakan Jumlah pemenang lomba desa/kelurahan terpilih | 180 desa 1 desa | 62.355.001 |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100 | 2.274.742.612 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100 | 2.274.742.612 |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan | 100% | 2.274.742.612 | Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/kota serta Pemberdayaan masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota | | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan | 100% | 2.274.742.612 |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang dibentuk Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang mengikuti workshop | 1 klp 1 klp | 208.800.674 | Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang dibentuk Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang mengikuti workshop | 1 klp 1 klp | 208.800.674 |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), | | Jumlah pembinaan KPM, LPMD/K yang dilaksanakan Jumlah monitoring LPMD/K yang | 80 orang 180 desa | 210.000.040 | Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, | | Jumlah pembinaan KPM, LPMD/K yang dilaksanakan Jumlah monitoring LPMD/K yang | 80 orang 180 desa | 210.000.040 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--------------------------|---------------|---|--|--|---|
| | lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | dilaksanakan | | | dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat | | dilaksanakan | |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | | Jumlah rakor BUMDes dan pasar desa yang dilaksanakan Jumlah pembinaan, monitoring, dan pendataan BUMDes dan pasar desa Jumlah lomba video kreatif ekonomi yang dilaksanakan | 7 kali | 249.999.929 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | | Jumlah rakor BUMDes dan pasar desa yang dilaksanakan Jumlah pembinaan, monitoring, dan pendataan BUMDes dan pasar desa Jumlah lomba video kreatif ekonomi yang dilaksanakan | 8 kali 249.999.929 |
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | Jumlah hibah kincir angin listrik yg dilaksanakan Jumlah hibah lampu pembasmi hama Jumlah lomba TTG yang diikuti | 3 klp, 4 klp, 1 kali | 245.263.070 | Fasilitasi Pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | Jumlah hibah kincir angin listrik yg dilaksanakan Jumlah hibah lampu pembasmi hama Jumlah lomba TTG yang diikuti | 3 klp, 4 klp, 1 kali 245.263.070 |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | Jumlah keg. BBGRM yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi gerakan gotong royong yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi terkaittr BBGR yang dilaksanakan | 15 kec 1 keg 5 keg | 201.199.124 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | Jumlah keg. BBGRM yang dilaksanakan Jumlah sosialisasi gerakan gotong royong yang dilaksanakan Jumlah koordinasi dan konsultasi terkaittr BBGR yang dilaksanakan | 15 kec 1 keg 5 keg 201.199.124 |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | | Jumlah evaluasi 10 program pokok PPK yang dilaksanakan Jumlah jambore kader yang dilaksanakan Jumlah monitoring pembinaan TP. PKK kabupaten ke desa Jumlah pemantapan kinerja kader PKK dalam penanganan stunting Jumlah resepsi HGG PPK se kab. Sampang yang dilaksanakan | 14 kec | 1.159.479.775 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | | Jumlah evaluasi 10 program pokok PPK yang dilaksanakan Jumlah jambore kader yang dilaksanakan Jumlah monitoring pembinaan TP. PKK kabupaten ke desa Jumlah pemantapan kinerja kader PKK dalam penanganan stunting Jumlah resepsi HGG PPK se kab. Sampang yang dilaksanakan | 14 kec 1.159.479.775 |

Hasil analisa menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan yang dijabarkan di Rancangan Awal RKPD 2022 sudah sesuai kebutuhan Program dan Kegiatan Dinas PMD Tahun 2022.

a. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi maupun perguruan tinggi. Berdasarkan hasil telaahan data dan informasi informasi dari penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Sampang. Uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Sampang Tahun 2021

Perangkat Daerah : Dinas PMD Kabupaten Sampang

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|-----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | NIHIL | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan Dinas PMD pada dasarnya adalah sebagai implementasi dan menunjang pada perencanaan pembangunan secara umum, sehingga pada bab ini usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Kabupaten Sampang adalah nihil.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, tentunya harus memperhatikan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini ditujukan demi tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2022 tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (**RKP**) Tahun 2022 dengan Tema “**Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas**”.

Dinas PMD sebagai unsur penunjang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dituntut untuk dapat menterjemahkan dan mensinergikan prioritas pembangunan antara provinsi dan daerah. Adapun sinkronisasi prioritas pembangunan daerah, provinsi dan pusat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten Sampang Tahun 2022

| NO. | NASIONAL | JAWA TIMUR | KABUPATEN SAMPANG |
|-----|--|--|--|
| 1 | Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan | Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengentasan kemiskinan | Prioritas 1: Peningkatan kualitas pembangunan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pengentasan kemiskinan Prioritas 4: Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional |
| 2 | Infrastruktur dan pemerataan wilayah | Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan | Prioritas 3: Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana |
| 3 | Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup | Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup | |
| 4 | Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja | Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui nilai tambah ekonomi dan pariwisata, kualitas ketenaga kerjaan serta perluasan kesempatan kerja | Prioritas 2: Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat |
| 5 | Stabilitas pertahanan dan keamanan | Peningkatan ketentraman dan ketertiban | Prioritas 5: Peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat |

Sumber : RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas PMD Tahun 2022 haruslah konsisten dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Dinas PMD yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PMD pada Tahun 2021 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2022

| No. | TUJUAN/SASARAN | TUJUAN/SASARAN | | TARGET TAHUN 2022 | |
|-----|--|----------------|---|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| | Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif | | | | |
| | Tujuan: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | | | |
| | Sasaran: Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa | 1 | Indeks Desa Membangun (IDM) | % | 0,61 |
| | KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | Tujuan: Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa | 1 | Indeks Desa Membangun (IDM) | % | 0,61 |
| | Sasaran: Meningkatnya Keswadayaan Masyarakat Desa | 1 | Persentase Desa Kategori Berkembang, Maju dan Mandiri | % | 100 |
| | Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik | | | | |
| | Tujuan: Menyelenggarakan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik | | | | |
| | Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | 1 | Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik | % | 81,11 180ds |
| | KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | |
| | Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa | 1 | Persentase desa dengan tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik | % | 81,11 180ds |
| | Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa | 1 | Persentase Desa dengan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang benar dan tepat waktu | % | 81,11 180ds |

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas PMD mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Dinas PMD mendukung pada pencapaian **misi 2** yaitu **“Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata, agribisnis serta ekonomi kreatif didukung oleh iklim investasi yang sehat”** dan **misi 4** yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Dinas PMD yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Sebagaimana telah tertuang dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024, Dinas PMD Kabupaten Sampang mendukung pada pencapaian misi 2 dan 4 RPJMD Kabupaten Sampang serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

Adapun program-program yang mendukung pada sasaran tersebut, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penataan Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan Dinas PMD Tahun 2022 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas PMD

Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 pada sistem aplikasi <https://e-planning.sampangkab.go.id/>.

c. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

d. Tabel Rencana Program Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Sampang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------------------|----------------|---|---|---|--|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|--|---|------|------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | |
| | | | | | | Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | | | | Tolok Ukur | Target | | | | |
| 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | 43.590.941.653 | | 43.590.941.653 | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | 4.216.118.446 | | 4.409.769.106 | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | 0 | | 0 | | | | | |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok perencanaan (renstra/renja) PD yg disusun | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 7 dok | 100 | 2.398.490 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | 100% | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok. RKA yang dibuat | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 dok | 100 | 2.398.490 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | 100% | 9.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|---|--------|---------------|----------------------|----------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok. Perubahan RKA yang dibuat | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 10 dok | 100 | 2.398.490 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | 100% | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok. DPA yang dibuat | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 29 dok | 100 | 2.398.490 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | 100% | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok. Perubahan DPA yang dibuat | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 dok | 100 | 2.398.490 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah dok LPPD, LKPJ, SAKIP yang disusun | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 dok | 100 | 2.398.765 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | 3.532.318.998 | | | | 3.537.669.106 | |
| 2 | 13 | 01 | 2,02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bln | 12 bln | 100 | 3.525.669.106 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 3.525.669.106 |
| 2 | 13 | 01 | 2,02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah pemenuhan alat tulis kantor | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12 bln | 12 bln | 100 | 6.649.892 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 6.649.892 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|---|-----|-----------------|----------------|-------------|-------------------|---|--|---|-------------|--------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | 57.452.287 | | | | | 133.000.000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah komponen listrik yang tersedia | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 4 Jenis | | 3.678.185 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 5.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah pengadaan peralatan kantor | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | 15 unit | 100 | | 8.726.727 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 12.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah barang cetak dan pengadaan yang tersedia | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | 10 dok | 100 | | 5.630.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | | 9.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah makan minum yang disediakan | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 400 doz | | | 3.120.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | | 7.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah pemenuhan kebutuhan rapat dan konsultasi dlm daerah | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 100 Kali | | | 36.297.375 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | | 100.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | 249.922.618 | | | | | 300.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|--|---|------|--|-----|--|--------------------|--|--------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2,07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah pengadaan peralatan mesin | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | | | | 25 paket | | 249.922.618 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase tersedianya urusan OPD | 100% | 300.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 194.533.328 | | | | | | 210.000.000 | |
| 2 | 13 | 01 | 2,08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah rek. Listrik, telepon, dan air yang dibayar | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | | 100 | | 12 Bulan | | 57.533.328 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase tersedianya urusan OPD | 100% | 60.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah jasa layanan umum yang dibayar | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | | 100 | | 50 | | 137.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase tersedianya urusan OPD | 100% | 150.000.000 |
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | 167.500.000 | | | | | 175.100.000 | | |
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah jasa servis yg dilakukan dan jumlah perpanjangan STNK | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | | 100 | | 32 Unit | | 163.100.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | | | 163.100.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|--|---|------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|
| 2 | 13 | 01 | 2,09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan | Jumlah servis peralatan kantor yang dilakukan | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap DPMD | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | 30 kali | 100 | 4.400.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | | 12.200.000 |
| 2 | 13 | 02 | | | PROGRAM PENATAAN DESA | | | | | | | 36.299.999.686 | | | | | 1.000.000.000 | |
| 2 | 13 | 02 | 2,01 | | Penyelenggaraan Penataan Desa | | | | | | | 36.299.999.686 | | | | | 1.000.000.000 | |
| 2 | 13 | 02 | 2,01 | 06 | Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa | Persentase BUMDes berkembang | Jumlah mobil siaga yang disediakan, jumlah bimtek pengelolaan Sumber air, jumlah poskamling yang dibangun | Jumlah aset desa yang dikelola BUMDEs | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 1 kali, 180 unit, 2 unit | | 36.299.999.686 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Jumlah aset desa yang dikelola BUMDEs | 57,78% | 1.000.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | | | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | 800.080.909 | | | | 3.406.814.953 | | |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | 800.080.909 | | | | 3.406.814.953 | | |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 01 | Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | (a) Persentase perencanaan dan penganggaran yg baik (b) Persentase desa dengan pengelolaan aset berbasis IT | Jumlah aparatur yang mendapat bimtek administrasi pemdes | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | (a) 100 77,78 | 120 desa | 180 desa | 61.611.188 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100%, 77,78% | 75.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 02 | Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 180 desa | 180 desa | 62.863.674 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | | 75.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|---|-------------|-----------------|----------|--------------------|--|--|---|-------------|----------------------|
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 180 desa | 180 desa | 69.662.477 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | | 75.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN yang dilaksanakan | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78 | 30 Orang | 180 desa | 65.931.983 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100 & 77,78 | 75.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pembinaan tupoksi, Jumlah aparatur desa yang mendapatkan BPJS, jumlah rakor tk. kec | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78 | 180 Desa | | 117.881.213 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100 & 77,78 | 2.526.414.953 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah monitoring dan evaluasi keuangan yang dilakukan | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78 | 70 Orang | 180 desa | 101.685.310 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100 & 77,78 | 110.400.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah fasilitasi pengisian anggota BPD, jumlah pembaruan data perangkat desa | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78 | 125 Desa | 180 desa | 108.090.193 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100 & 77,78 | 120.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|---|---|--------------|----------------|---------------|--------------------|--|---|-------------|--------------------|
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 13 | Fasilitas Pengelolaan Aset Desa | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah aparatur desa yang dapat pembinaan tata kelola aset | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78 | 38 Desa | 180 desa | 149.999.870 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | 100 & 77,78 | 250.000.000 |
| 2 | 13 | 04 | 2,01 | 18 | Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Persentase perencanaan yg baik dan persentase tata aset yang baik | Jumlah evaluasi desa yg dilaksanakan serta jumlah desa pemenang lomba desa | Jumlah pemilihan, pengangkatan dan pembinaan kapasitas kades | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 & 77,78% | 3 Desa | 180 Desa | 62.355.001 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | | 100.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | | | | | | | 2.274.742.612 | | | 2.850.000.000 | | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | 2.274.742.612 | | | 2.850.000.000 | | |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 02 | Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang mengikuti workshop | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 5 Keg | | 208.800.674 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 250.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---|---|------|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|---|------|--------------------|
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 03 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah KPM, LPMD yang mendapatkan pembinaan. | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | 186 desa | 186 desa | 210.000.040 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 250.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah bimtek BUMDes yang dilaksanakan, jumlah lomba video kreatif yg diikuti, jumlah pembinaan pasar desa, jumlah rakor BUMDes dan pasar desa yang dilaksanakan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 | 14 kec, 5 keg. | 180 desa | 249.999.929 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 350.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2,01 | 06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah hibah kincir angin listrik, jumlah hibah barang (lampu mengusir hama), jumlah lomba TTG yang dilaksanakan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 7 kelompok | 180 desa | 245.000.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 250.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|---|---|------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|---|------|----------------------|
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah BBGRM yang dilaksanakan, jumlah sosialisasi gerakan gotong royong yang dilaksanakan, jumlah rakor BBGR yang dilaksanakan | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 14 kec, 5 keg. | 180 desa | 101.199.124 | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 250.000.000 |
| 2 | 13 | 05 | 2.01 | 09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan keluarga | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | Jumlah evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, jumlah jambore kader yang dilaksanakan, jumlah monitoring dan evaluasi TP. PKK desa, jumlah pemantapan kinerja kader dalam penanganan stunting, | lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga ekonomi desa yang mendapat pembinaan | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100% | 14 kec, 180 ds/6 kel | 14 kec, 180 ds/6 kel | 1.459.479.775 | Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | 100% | 1.500.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | 2.01TOTAL | 43.590.941.000 | | 43.590.941.000 | | |

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas PMD mengampu urusan Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Program-program Dinas PMD pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan **“Prioritas 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik didukung Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Percepatan Reformasi Birokrasi”** sebagaimana tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022. Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas PMD Tahun 2022

| Kode | Uraian/Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja | Target 2022 | Pagu Pendanaan 2022 (Rp.) |
|----------------------|---|---|-------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.13 | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 9.497.189.000 |
| 2.13.01 | Program Penunjang Urusan pemerintah daerah kab/kota | | | |
| 2.13.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Peresentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang dibuat | 100% | 14.391.490 |
| 2.13.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang dibuat | 10 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DKA-SKPD yang dibuat | 29 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.490 |
| 2.13.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang dibuat | 7 dokumen | 2.398.765 |
| 2.13.01.2.02. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan keuangan perkantoran | 100% | 3.532.318.998 |
| 2.13.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah aparatur yang menerima gaji dan tunjangan | 12 bln | 3.525.669.106 |

| | | | | |
|---------------------|--|---|-------------|--------------------|
| 2.13.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksana tugas ASN | Jumlah pemenuhan alat tulis kantor | 12 bln | 6.649.892 |
| 2.13.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian | 100% | 21.020.000 |
| 2.13.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasar tugas dan fungsi | | | 21.020.000 |
| 2.13.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi umum OPD | 100% | 178.229.000 |
| 2.13.01.2.06.01 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | 3.678.185 |
| 2.13.01.2.06.02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 15 unit | 8.726.727 |
| 2.13.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang tersedia | 10 dokumen | 5.630.000 |
| 2.13.01.2.06.08 | Fasilitasi kunjungan Tamu | Jumlah kunjungan tamu selama 1 tahun | 400 | 3.120.000 |
| 2.13.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan | 100 paket | 36.297.375 |
| 2.13.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 219.348.196 |
| 2.13.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah peralatan dan mesin untuk kebutuhan kantor yang tersedia | 25 unit | 249.922.618 |
| 2.13.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 194.533.328 |
| 2.13.01.2.08.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah tagihan listrik, air dan telepon yang dibayar | 12 bulan | 57.533.328 |
| 2.13.01.2.08.04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Jumlah pelayanan umum yang tersedia | 100 | 137.000.000 |
| 2.13.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 167.500.000 |
| 2.13.01.2.09.02 | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | | 163.100.000 |

| | | | | |
|---------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 2.13.01.2.09.06 | Pemeliharaan peralatan mesin lainnya | | | 4.400.000 |
| 2.13.02 | PROGRAM PENATAAN DESA | | | 36.299.999.686 |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | Prosentase penyelenggaraan tata aset BUMDEs yang baik | 100% | 36.299.999.686 |
| 2.13.02.2.01.06 | Fasilitasi sarana dan prasarana desa | Persentase BUMDes berkembang | 57,78% | 36.299.999.686 |
| 2.13.04 | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | | | 800.080.909 |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Persentase pembinaan dan pengawasan administrasi desa yang baik | 100% | 800.080.909 |
| 2.13.04.2.01.01 | Fasilitasi Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa | Jumlah aparatur yang mendapatkan bimtek administrasi pemdes | 180 Desa | 61.611.188 |
| 2.13.04.2.01.02 | Fasilitasi Penyusunan produk hukum desa | Jumlah produk hukum yang disosialisasikan | 10 | 62.863.674 |
| 2.13.04.2.01.03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah dokumen perencanaan desa yang difasilitasi | 180 desa | 69.662.477 |
| 2.13.04.2.01.04 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah input data SISKEUDES dan OMSPAN | 30 orang | 65.931.983 |
| 2.13.04.2.01.05 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa | Jumlah aparatur desa yang dibina terkait tupoksi, jumlah aparatur desa yang mendapat BPJS, dan jumlah rakor penyelenggaraan pemdes yang dilaksanakan | 360 orang | 117.881.213 |
| 2.13.04.2.01.07 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Monitoring dan evaluasi perdes yang dilaksanakan | 30 orang | 101.685.310 |
| 2.13.04.2.01.10 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Terlaksananya pelantikan perangkat desa | 125 desa | 108.090.193 |
| 2.13.04.2.01.13 | Fasilitasi Pengelolaan aset desa | Jumlah aparatur yang mendapatkan pelatihan pengelolaan aset desa | 38 | 149.999.870 |

| | | | | |
|---------------------|---|--|-------------|----------------------|
| 2.13.04.2.01.18 | Fasilitasi evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan | Jumlah evaluasi kegiatan lomba desa dan kelurahan | 3 | 62.355.001 |
| 2.13.05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan hukum adat Perdesaan | 100% | 2.274.742.612 |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota | Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | 100% | 2.274.742.612 |
| 2.13.05.2.01.02 | Fasilitasi penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat | Jumlah lembaga tradisi masyarakat yang mengikuti workshop | 1 | 80.800.674 |
| 2.13.05.2.01.03 | Peningkatan kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi deas yang mendapatkan pembinaan kapasitas kelembagaan | 180 | 210.000.000 |
| 2.13.05.2.01.05 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa | Jumlah kegiatan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan, jumlah pembinaan pengurus pasar desa yang dilaksanakan, jumlah partisipasi lomba BUMDes yang diikuti, dan jumlah rakor BUMDes dan pasar desa | 180 | 249.999.929 |

| | | | | |
|-----------------|---|---|--------------|---------------|
| 2.13.05.2.01.06 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Terlaksananya keikutsertaan posyantek desa dalam ajang pameran TTG | 1 paket | 146.263.070 |
| 2.13.05.2.01.07 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah kegiatan BBGRM yang dilaksanakan, jumlah sosialisasi gerakan gotong royong yang dilaksanakan | 14 kec | 101.199/124 |
| 2.13.05.2.01.09 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga | Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan program pokok PKK yang dilaksanakan, jumlah jambore kader PKK yang dilaksanakan, jumlah monitoring dan pembinaan PKK yang dilaksanakan, jumlah pemilihan kader terbaik PKK yang dilaksanakan, jumlah resepsi HKG yang dilaksanakan | 186 desa/kel | 1.459.479.775 |

Pada Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang akan melaksanakan Urusan Unsur Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp. 43.590.941.653,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.525.669.106,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 40.065.272.547,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 4 program, 9 kegiatan dan 34 Sub kegiatan..** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada dalam lingkup Kabupaten Sampang.

BAB V PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas PMD Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan kontribusi sektor unggulan dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan Dinas PMD Kabupaten Sampang yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatnya kemampuan dan kemandirian desa dan Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.”**

Hasil evaluasi atas Renja Dinas PMD Kabupaten Sampang tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja program/kegiatan adalah 87,41% atau dapat dikategorikan sangat baik. Sedangkan capaian kinerja program/kegiatan tahun 2021 hingga 30 Juli 2021 adalah 39%. Berkenaan dengan hal tersebut memang perlu ada peningkatan penyerapan anggaran agar pada akhir tahun anggaran kinerja program/kegiatan dapat tercapai optimal.

Untuk Renja Dinas PMD Tahun 2022 haruslah efisien, konsisten dan sinergi dengan tujuan dan sasaran Dinas PMD yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2019-2024. Adapun tujuan Dinas PMD adalah **“Meningkatkan Kemandirian Desa serta Tata Kelola Pemerintahan Desa”** yang didukung oleh dua sasaran yaitu: **Menguatkan Keswadayaan dan kemandirian masyarakat Desa dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa.**

Pada tahun 2022 Dinas PMD akan melaksanakan Urusan Unsur Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp. 43.590.941.653,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.525.669.106,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 40.065.272.547,- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dan melaksanakan **1 urusan, 4 program, 9 kegiatan dan 34 Sub kegiatan.** Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka pelaksanaan renja tahun 2022, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dan langkah tindak lanjut supaya program dan kegiatan yang telah di rencanakan sesuai dengan harapan pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang haruslah berpedoman kepada RKPD dan disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan propinsi supaya perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan selaras dan bersinergi;
2. Dokumen Renja ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022;
3. Dokumen Renja ini digunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat tahunan.

Plt. KEPALA DINAS PMD

Drs. R. Chalilurrachman, M.Si

NIP. 19691102.199003.1.004